

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN
2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Zona Integritas pada tahun 2021, khususnya pada Inspektorat, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengatasi hambatan – hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan Zona Integritas pada Tahun 2021 sehingga dapat segera dilakukan tindakan koreksi atau modifikasi apabila terjadi penyimpangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Zona Integritas di Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 232 Tahun 2022 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Inspektorat Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas pada Inspektorat adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan Zona Integritas pada Inspektorat di Lingkungan Kepaniteraaan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sasaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Zona Integritas pada Inspektorat Tahun 2021, antara lain adalah:

1. Mengidentifikasi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi Zona Integritas pada Inspektorat yang telah ditetapkan untuk tahun 2021;
2. Mengidentifikasi hambatan, permasalahan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan Zona Integritas pada area penguatan pengawasan
3. mengidentifikasi alternatif solusi sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan Zona Integritas pada Inspektorat .

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas di Inspektorat adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Zona Integritas pada Inspektorat Tahun 2021.

BAB II
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS
DI INSPEKTORAT

No	Kegiatan	Output	Proses	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut	
1.	Gratifikasi	1 Penyempurnaan Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	1	Penyempurnaan Kebijakan Gratifikasi	telah dilaksanakan		akan disesuaikan dengan peraturan KPK
			2	Menyebarkan/mendiseminasikan media sosialisasi pesan Anti Gratifikas	telah dilaksanakan	Materi diseminasi anti gratifikasi seluruhnya masih berasal dari KPK	akan terus dilakukan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
			3	Melakukan Sosialisasi Gratifikasi secara mandiri Oleh UPG	telah dilaksanakan		
			4	Melakukan Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	akan dilaksanakan pada Tahun 2022	Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Stake Holder dan unit kerja	Akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut
			5	Perbaikan Pedoman Gratifikasi dan Perbaikan Sistem Gratifikasi	akan dilaksanakan pada Tahun 2022	Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Stake Holder dan unit kerja	Akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut
			6	Melibatkan stakeholder dalam implementasi pengendalian gratifikasi	Sudah dilaksanakan dengan mengirimkan surat ttg Mahkamah Konstitusi tidak menerima gratifikasi kepada para stake holder		
	Gratifikasi	2 Meningkatkan Kompetensi Tim UPG di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	1	Mengikuti <i>e-learning</i> gratifikasi dari KPK	sudah terlaksana		
			2	Mengikuti/menginisiasi Bimbingan Teknis terkait implementasi PPG	sudah dilaksanakan		
		3 Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi oleh UPG di Mahkamah Konstitusi	1	Laporan Pengelolaan Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi	sudah terlaksana		

No.	Kegiatan	Output	Proses	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut	
2	Pelaksanaan SPIP	1 Penyempurnaan Pelaksanaan SPIP	1	Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pembina (BPKP) dalam persiapan pelaksanaan SPIP terintegrasi	Pada bulan Desember Tahun 2021 BPKP melakukan pendampingan Penilaian SPIP terintegrasi pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi	Belum semua JFA mengikuti pelatihan SPIP terintegrasi sehingga masih perlu pendampingan dalam pelaksanaannya	Bekerjasama dengan BPKP dan mengusulkan Kembali usulan Diklat terkait untuk JFA
			2	Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pembina (BPKP) dalam persiapan pelaksanaan CACM	sudah dilaksanakan		
			3	Melakukan Sosialisasi SPIP terintegrasi kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	akan dilaksanakan pada 2022		
		2 Penyempurnaan Manajemen Risiko	1	Melakukan Monev profil risiko unit kerja	Pada Tahun 2021 telah dilakukan Monev terhadap Profil Risiko Seluruh Unit Kerja	Masih perlu perbaikan terhadap profil risiko unit kerja	Akan dilakukan penyesuaian Kembali profil risiko unit kerja dengan target kinerja unit Tahun 2022
			2	Membentuk Risk Officer pada unit kerja	sudah dilaksanakan		
			3	Melaksanakan Bimtek Manajemen Risiko Bagi Risk Officer Tahun 2021	sudah dilaksanakan		
		3 Penguatan Profesionalisme APIP	1	Mengikutsertakan APIP dalam Bimtek SPIP terintegrasi yang di selenggarakan BPKP	sudah dilaksanakan		di rencanakan seluruh APIP akan diikuti Bimtek SPIP terintegrasi
			2	Mengusulkan sertifikasi profesi bagi APIPRB	Sudah dilaksanakan yaitu sertifikasi <i>Fraud Audit</i> dan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko		Akan diusulkan sertifikasi keahlian lain yang sebagai kegiatan pengembangan APIP

No.	Kegiatan	Output	Proses	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut	
3	Pengaduan Masyarakat	1 Penyempurnaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	Melakukan Sosialisasi terkait Pengaduan Masyarakat	sudah dilaksanakan		
			2	Melakukan pembaharuan data wajib lapor serta perbaikan format database LHKPN MK	sudah dilaksanakan		
			3	Penyusunan SOP tentang Pengelolaan LHKPN MK	Sudah dilaksanakan		
			4	Berkolaborasi dengan Menpan dalam pengelolaan Dumas Melalui aplikasi SPAN LAPOR	sudah dilaksanakan		
		2 Pelaporan Pengaduan Masyarakat	1	Menerbitkan laporan Monev secara berkala setiap Triwulan	sudah dilaksanakan		
4	Whistle Blowing System	1 Penyempurnaan Pengelolaan WBS	1	Melakukan Diseminasi Konten terkait Whistle Blowing System	sudah dilaksanakan		Video "Ayo Lapor" akan di sebarakan secara berkala kepada pegawai melalui berbagai media
			2	Memperbaiki Pedoman Penanganan WBS	Akan dilanjutkan pada Tahun 2022	diperlukan koordinasi lebih lanjut	
			3	Memperbaiki fitur Aplikasi WBS, khususnya perbaikan kerahasiaan pelapor	Akan dilanjutkan pada Tahun 2022	diperlukan koordinasi lebih lanjut	
			4	Menyusun Mekanisme Pelaporan/Pengaduan Untuk Pimpinan tertinggi	Akan dilaksanakan pada Tahun 2022	diperlukan koordinasi lebih lanjut	Melakukan Studi Tiru ke Instansi lain yang sudah mempunyai mekanisme hal tersebut
		2 Pelaporan Pengaduan Masyarakat	1	Menerbitkan laporan Monev secara berkala setiap Triwulan	sudah dilaksanakan		

No.	Kegiatan	Output	Proses	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut		
5	Penanganan Benturan Kepentingan	1 Penyempurnaan Pengelolaan Benturan Kepentingan	1	Koordinasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan dengan Stake Holder	Sudah dilaksanakan			
			2	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Sudah dilaksanakan			
			3	koordinasi dengan Menpan terkait dengan proses pemetaan benturan kepentingan Menpan	Sedang dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada Tahun 2022	Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Stake Holder	Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut	
			4	Pemetaan Benturan Kepentingan pda unit kerja	Akan dilanjutkan pada Tahun 2022			
			5	Penyusunan Format laporan Benturan Kepentingan pada unit kerja	Sedang dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada Tahun 2022			
		2	Pelaporan Benturan Kepentingan	1	Menerbitkan laporan Monev secara berkala setiap Triwulan	Sudah dilaksanakan		

No.	Kegiatan	Output	Proses	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut	
6	Pembangunan ZI	1 Pengajuan Predikat WBK/WBBM	1	Menyiapkan Usulan Unit Kerja Calon WBK/WBBM	Sudah dilaksanakan		
			2	Membentuk Tim Penilai Internal	Sudah dilaksanakan		
			3	Melakukan Pendampingan terhadap Unit Kerja Calon WBK/WBBM dalam Menyiapkan Usulan Predikat WBK/WBBM	Sudah dilaksanakan		
			4	Melakukan <i>Self Assesment</i> terhadap Unit Kerja Calon WBK/WBBM	Sudah dilaksanakan dan terhadap unit kerja calon WBK/WBBM pada bulan Juni s.d Juli 2021		
			5	Mengusulkan Unit Kerja terpilih untuk mendapat predikat WBK/WBBM kepada TPN melalui PMPZI	Sudah diusulkan kepada TPN pada bulan Juli 2021		
		2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan ZI	1	Melakukan Sosialisasi ZI kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kepaniteraan MK	Sudah dilaksanakan kepada pegawai pada unit kerja calon WBK/WBBM		Koordinasi dengan Biro Humas untuk membuat kontent sosialisasi melalui media digital
			2	Pemberian Reward terhadap Unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM	Sudah dilaksanakan pada bulan November 2021	Telah dilaksanakan pemberian Reward bagi unit kerja peraih predikat WBK dan unit kerja yang berprestasi lainnya	

			3	Bekerjasama dengan Unit lain untuk peningkatan pelayanan prima di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Akan dilaksanakan pada Tahun 2022	keterbatasan anggaran	
--	--	--	---	--	-----------------------------------	-----------------------	--

No.	Kegiatan	Output	Proses	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut	
7	APIP	1 Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas APIP	1	Mengajukan permohonan sertifikasi auditor di Inspektorat kepada pimpinan	Telah dilaksanakan kegiatan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko / <i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i> untuk APIP, <i>Risk Officer</i> dan Perwakilan Pejabat Struktural dan Fungsional dari Setiap Unit Kerja		Akan diusulkan untuk Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko level III bagi APIP
			2	Pengusulan Diklat Teknis/Substansi bagi APIP	Sudah diusulkan namun belum ada tanggapan	1.Ketersediaan Anggaran 2.Penyelenggara membatalkan/menunda pelaksanaan diklat karena pandemi covid 19	Mengusulkan kembali dan berkoordinasi dengan penyelenggara
			3	<i>In House Training</i> Penguatan Kapasitas dan Kompetensi APIP	akan dilaksanakan pada Tahun 2022	Belum dapat dilaksanakan karena ketersediaan Anggaran	Mengusulkan Kembali pada Tahun 2022

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Zona Integritas pada Inspektorat meliputi kegiatan membangun budaya anti korupsi yang terdiri atas pengelolaan gratifikasi, bentutan kepentingan, pengaduan masyarakat, dan *whistleblowing system* (WBS), pembangunan Zona Integritas , pelaksanaan SPIP dan optimalisasi peran APIP.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan Zona Integritas pada Inspektorat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretraiat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut lain :

1. Menetapkan rencana aksi dengan mendasarkan pada rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Zona Integritas tahun 2020;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu dan tahapan yang di tetapkan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas pada Inspektorat guna mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan tersebut.

Zona Integritas pada Inspektorat sampai dengan bulan Desember 2021, secara garis besar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dan tidak ada kendala yang berarti.

Dari 39 kegiatan yang di tetapkan dalam rencana aksi, sampai dengan bulan Desember 2021 sebagian besar telah terlaksana dengan baik, dan 2 kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran, namun demikian kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun 2022.

Demikianlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Inspektorat periode Januari s.d Desember 2021.

Jakarta, {xxxtanggal}

Budi Achmad Djohari